

ABSTRAK

Cagar Budaya memiliki nilai yang krusial bagi kepentingan bangsa. Hal ini seperti yang tertuang dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Bangunan cagar budaya merupakan salah satu aspek cagar budaya yang harus kita lestarikan. Peninggalan bersejarah yang perlu kita lindungi adalah berupa bangunan-bangunan yang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan juga kaya akan bangunan cagar budaya. Banyak bangunan cagar budaya di Kota Bandung yang diincar oleh para investor untuk dijadikan tempat usaha. Hal ini dapat dikarenakan minimnya sosialisasi undang-undang cagar budaya pada para pemilik gedung serta para pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Rumah Kembar karya Presiden Soekarno yang terletak di persimpangan Jalan Gatot Subrot dan Jalan Malabar yang dibongkar tanpa seizin pemerintah; Gedung Swarha yang juga merupakan salah satu gedung cagar budaya yang seharusnya di revitalisasi. Karena gedung ini sudah tidak lagi berfungsi sebagai hotel. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terhadap renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung dan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (Disbudpar) Kota Bandung terhadap renovasi cagar budaya di Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dengan menggunakan metode analisis data dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya implementasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terhadap renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung belum cukup optimal dikarenakan penerapan undang-undang mengenai cagar budaya di lapangan tidak sesuai dengan semestinya. Faktor penghambat dari jalanya implementasi maupun penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terhadap renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung yakni kurangnya sosialisasi dan Koordinasi birokrasi buruk menjadi salah satu kendala penyelamatan cagar budaya di Kota Bandung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada kenyataannya dalam menjalankan tugasnya yakni bertanggungjawab atas pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung belum cukup operasional dengan sepenuhnya. Karena dengan adanya beberapa permasalahan mengenai renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung.

Kata kunci : Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (DISBUDPAR)

ABSTRACT

Cultural Heritage has a crucial value for the benefit of the nation. This is stated in the consideration of The Law Number 11 Year 2010 Concerning Cultural Heritage. Cultural heritage buildings is one aspect of cultural heritage that we must preserve. The historical heritage that we need to protect is in the form of buildings that are more than 50 years old. Bandung City is one of the major cities in Indonesia and is also rich in cultural heritage buildings. Many cultural heritage buildings in the city of Bandung are targeted by investors to become a place of business. This can be caused by the lack of socialization of cultural heritage laws to building owners and policy makers in the City Government of Bandung. The Twins House by President Soekarno's located at the intersection of Gatot Subrot Street and Malabar Malabar Street which was destroyed without government permission. Swarha Building which is also one of the cultural heritage buildings that must be revitalized. Because this building no longer functions as a hotel. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of Law Number 11 Year 2010 concerning Cultural Heritage to renovation of cultural heritage buildings in the city of Bandung and to determine and analyze the role of the Bandung City Culture and Tourism Office (Disbudpar) in renovating cultural heritage in Bandung.

The research method used by the author in the preparation of this thesis is a normative juridical research method, with the aim of analyzing the problems that occur by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials related to the problem investigated by the author. Then using the method of data analysis using qualitative juridical analysis methods.

The results of this thesis research can be concluded that the implementation and application of the Law Number 10 Year 2011 Concerning Cultural Heritage for renovation of cultural heritage buildings in the city of Bandung has not been optimal because the application of laws on cultural heritage in the field is not in accordance with semestiny. The inhibiting factors for the implementation and implementation of the Law Number 10 Year 2011 Concerning Cultural Heritage for renovation of cultural heritage's buildings in the city of Bandung, namely the lack of socialization and poor coordination of bureaucracy is one of the obstacles to saving cultural heritage in the city. from Bandung. In fact, Culture and Tourism Office of Bandung City in carrying out its duties is responsible for managing cultural heritage in the city of Bandung, which has not yet been fully operational. Because with some problems regarding renovation of cultural heritage buildings in the city of Bandung.

Keywords : Cultural Heritage, Cultural Heritage Buildings, Culture and Tourism Office of Bandung City (DISBUDPAR)